

I. PENDAHULUAN

Unit Kerja Penelitian (UKP)*, yang dalam buku ini dapat berupa: Pusat, Balai Besar, Balai Penelitian, Balai Pengkajian dan Loka Penelitian Pertanian, merupakan satuan organisasi kerja yang bersifat unik, berbeda dengan satuan unit kerja kantor pemerintahan pada umumnya. UKP bukan termasuk kantor pelayanan secara langsung, bukan pengawasan, pemeliharaan, pengaturan, pengajaran, dan bukan unit penerangan. Kontak kepentingan antara UKP dengan masyarakat pengguna secara langsung dapat dikatakan jarang. Sifat tugas kerja UKP yang demikian dapat berakibat positif dan negatif terhadap langgam-irama kerja dan kinerjanya. Positif, apabila manajer UKP dapat memanfaatkan seluruh sumberdayanya secara optimal, karena tidak terbebani tugas rutin pelayanan umum setiap hari, sebagaimana halnya kantor pemerintah lainnya. Tetapi dapat berakibat negatif, oleh karena tidak terdapat keluhan dan aduan masyarakat terhadap kinerja UKP. UKP dapat saja bekerja semauanya, atau tidak bekerja secara produktif. Pada kondisi dan sifat tugas pekerjaan unik itulah seorang Kepala sebagai Manajer UKP diberi kepercayaan untuk memimpin dan menjadikan UKP berkarya, berprestasi dan berhasil-guna.

Pimpinan UKP sebagai Manajer, beserta seluruh pejabat formal struktural, mempunyai tugas dan tanggung-jawab mengelola UKP yang dipimpinnya bekerja dengan baik, dalam menjalankan Misi dan Tugas-Fungsi UKP, yaitu menghasilkan inovasi teknologi dan informasi bidang pertanian yang bermanfaat bagi kemajuan pertanian, baik diminta ataupun tidak diminta. Pengguna hasil penelitian UKP kecuali BPTP, berdasarkan tugas-fungsi UKP adalah instansi pemerintah yang bertindak sebagai pengguna antara. Apabila minat Instansi Pemerintah tersebut terhadap hasil penelitian rendah, maka hasil penelitian menjadi tidak efektif. Hubungan antara instansi pengguna dengan UKP yang jauh, baik secara jarak fisik ataupun jarak hubungan struktural organisasi juga akan menghambat pemanfaatan hasil penelitian. Kondisi demikian menjadikan hasil kerja UKP secara formal sangat diperlukan, akan tetapi secara faktual sering kurang diperhatikan, Apalagi bila kinerja UKP rendah, akan lebih rendah lagi arus alih teknologi dan komunikasi antara UKP dengan Instansi pengguna hasil penelitian. Khusus untuk BPTP, hasil pengkajian teknologi bisa langsung digunakan oleh para pelaku

*) Unit Kerja Tingkat Eselon II (UK) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tingkat Eselon III, merupakan Unit Kerja Penelitian Lingkup Badan Litbang Pertanian. Dalam buku ini keduanya diberi istilah Unit Kerja Penelitian (UKP).

usaha pertanian, penyuluh dan Dinas Teknis di Provinsi dan Kabupaten. Apabila UKP-BPTP cukup produktif, maka hambatan alih teknologi tersebut tidak akan terjadi.

Gambaran tersebut bukan berarti aliran teknologi selalu bernuansa negatif. Tetapi dalam berbagai kadar, jaringan alih teknologi dan arus komunikasi antara UKP dengan Instansi pengguna hasil penelitian masih rendah, atau kurang lancar. Keberadaan UKP sering kurang dimanfaatkan oleh Instansi pengguna atau oleh masyarakat pertanian pengguna teknologi secara operasional, Tugas Kepala/Manajer UKP tidak hanya memimpin unit kerjanya agar menghasilkan teknologi dan informasi yang bermanfaat, tetapi termasuk juga mengomunikasikan hasil penelitian secara efektif kepada semua Instansi pengguna dan pemangku kepentingan.

Dalam praktik, tentu tidak mudah untuk mengomunikasikan hasil penelitian dari UKP dengan semua Instansi pengguna dan pemangku kepentingan, termasuk Dinas Teknis di semua Kabupaten, Provinsi dan secara Nasional di Indonesia. Untuk mengatasi hambatan tersebut, komunikasi antara UKP Nasional dengan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) di Provinsi, perlu lebih diintensifkan.

Kepala UKP Nasional perlu secara aktif berkomunikasi secara timbal balik dengan BBP2TP dan dengan BPTP di semua Provinsi atas dasar tugas fungsional, baik secara formal maupun secara informal. Hasil penelitian UKP Nasional yang dinilai layak sebagai teknologi aplikatif ataupun sebagai informasi yang bermanfaat, harus disalurkan secara langsung melalui jembatan penghubung yang tersedia, yaitu BBP2TP dan BPTP. Kinerja nyata UKP Nasional sudah sewajarnya dinilai berdasarkan banyaknya teknologi aplikatif dan informasi baru yang disalurkan oleh UKP Nasional kepada BBP2TP maupun BPTP.

Kepala UKP sebagai Manajer, fungsinya dapat disamakan dengan Direktur Utama suatu Perusahaan, tidak hanya memproduksi barang dan jasa yang banyak dan bagus, tetapi juga harus mampu mendistribusikan dan memasarkan produknya ke pasar dan outlet di seluruh pelosok Indonesia, agar pengguna dapat membeli dan memanfaatkannya. Pimpinan UKP yang kerjanya kurang berhasil, dapat diibaratkan seperti seorang manajer perusahaan yang produknya buruk, jumlah produknya sedikit dan tidak mampu menjual produknya. Produk yang tidak berkualitas tersebut akan menumpuk di gudang, sehingga tidak ada pilihan lain, selain menutup perusahaannya.

Tidak ada seorang pimpinan UKP yang menginginkan UKP yang dipimpinnya tidak berdaya-guna sehingga harus ditutup. Pimpinan UKP tidak boleh melupakan tugas utamanya selama memimpin, yaitu harus mampu menghasilkan produk teknologi dan informasi baru yang benar-benar diperlukan dan bermanfaat. Alasan dapat dicari dari berbagai penyebab atas kegagalan, akan tetapi harus disadari bahwa pimpinan UKP juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kegagalan program kerja suatu UKP. Bagi seorang pimpinan, kegagalan dalam menjalankan tugas harus diakui sebagai kesalahannya. Tentu saja kurang berhasilnya suatu UKP dalam menjalankan misinya dapat diukur secara proporsional berdasarkan pada ketersediaan anggaran, jumlah peneliti, waktu lamanya bertugas dan kondisi lingkungan UKP-nya.

Uraian tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran bahwa berhasil-tidaknya UKP dalam melaksanakan tugas dan misinya, sangat tergantung pada keterampilan manajerial pimpinannya. Pimpinan UKP memang memikul tanggung jawab yang besar apabila dilihat dari tugas dan fungsinya. Padahal yang menjalankan tugas dan fungsi suatu UKP adalah peneliti, pengkaji, dan penyuluh dengan penguasaan pengetahuan teknis yang beragam. Dalam kondisi yang demikianlah Pimpinan UKP dituntut untuk mampu mengoptimalkan kinerja UKP yang dipimpinnya.

- (2) Hasil penelitian semestinya layak diadopsi oleh pengguna, karena hasil penelitian telah teruji mampu meningkatkan produktivitas; efisiensi produksi; mutu produk; atau nilai tambah.
- (3) Hasil penelitian semestinya mampu memberikan panduan dalam pemanfaatan sumberdaya pertanian secara ekonomis, menguntungkan, ekologis dan berkelanjutan.
- (4) Hasil penelitian berupa teknologi atau informasi semestinya bersifat praktikal-operasional, ergonomik (nyaman kerja), dan layak dari segi ekonomi, teknik, sosio-budaya dan lingkungan.
- (5) Inovasi teknologi dan invensi produk baru semestinya memiliki kelayakan ekonomis, sosial, ekologis dan ergonomis, serta layak dikembangkan sebagai usaha.

Hasil penelitian semestinya layak diaplikasikan untuk menjadikan usaha pertanian bertambah maju dan memuaskan pelaku usaha, karena dengan mengadopsi teknologi, usaha pertanian menjadi lebih menguntungkan. Tentu masih banyak lagi makna dan harapan dari manfaat hasil-hasil penelitian pertanian. Walaupun dari setiap judul penelitian tidak selalu

